

TESIS

**KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN
DI KECAMATAN TIKKE RAYA KABUPATEN PASANGKAYU**

*VILLAGE HEAD LEADERSHIP STYLE IN DEVELOPMENT IN
TIKKE RAYA DISTRICT PASANGKAYU REGENCY*

FATUR RAHMAN HIDAYAT MARHAS

E062 21 1005



**MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

**KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI
KECAMATAN TIKKE RAYA KABUPATEN PASANGKAYU**

Disusun dan diajukan oleh
FATUR RAHMAN HIDAYAT MARHAS
E062 21 1005

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **09 Februari 2023**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Ketua Penasehat



Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si.
NIP. 195708181984031002

Anggota Penasehat



Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si.
NIP. 196804112000121001

Mengetahui

Plt. Ketua Program Studi Magister
Ilmu Pemerintahan



Dr. A.M. Rusli, M.Si.
NIP. 19640727991031001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin



Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.
NIP. 197508182008011008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatur Rahman Hidayat Marhas

Nim : E06221 005

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya sendiri bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran dari orang lain. Apabila ditemukan atau terbukti dan dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain. Saya siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 09 Februari 2023

Yang menyatakan



Fatur Rahman Hidayat Marhas

ABSTRAK

Fatur Rahman Hidayat Marhas, E06221005. *“Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan di Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu”* (dibimbing oleh Djuanda Nawawi dan Suhardiman Syamsu).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimanakah Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Makmur Jaya dan Desa Pajalele dalam Penyelenggaraan Pembangunan Serta faktor-faktor yang mempengaruhi gaya Kepemimpinan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan tipe deskriptif, Teknik pengumpulan data dilakukan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Pajalele dan Desa makmur jaya, berdasarkan empat indikator yang peneliti gunakan yakni, Direktif, Konsultatif, Partisipatif, dan delegatif. Kedua kepala desa menerapkan keempat Gaya tersebut sesuai dengan keadaan dan regulasi yang ada, namun dapat kita ketahui Kepala Desa Pajalele lebih cenderung pada gaya kepemimpinan Direktif dilihat dari banyak kalangan masyarakat tidak mengetahui program pembangunan yang dijalankan di desa sehingga membuat kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk proaktif dalam hal pembangunan, kebijakan-kebijakan yang dibuat sebagian juga belum tepat sasaran. Kepala Desa makmur Jaya cenderung pada Gaya kepemimpinan Konsultatif dapat dilihat dari inisiatif beliau untuk memberikan ruang kepada masyarakat dan bawahan dalam menyampaikan aspirasi serta gagasannya.

Kata kunci: Gaya Kepemimpinan, Pengambilan Keputusan, Penyelenggaraan/Perencanaan

ABSTRACT

Fatur Rahman Hidayat Marhas, E062211005. *"Village Head Leadership in Development in Tikke Raya District, Pasangkayu Regency"*(supervised by Djuanda Nawawi and Suhardiman Syamsu).

This study aims to analyze how the leadership styles of the heads of Makmur Jaya and Pajalele villages in implementing development as well as the factors that influence leadership styles. The research method used is a qualitative research method, with a descriptive type. Data collection techniques were carried out using interviews, observation and documentation. The results of the study show that Pajalele Village and Prosperous Village are jaya, based on the four indicators that the researchers used, namely, Director, Consultative, Participatory, and Delegative. The two village heads applied the four Styles in accordance with existing conditions and regulations, However, we know that the Head of Pajalele Village is more inclined towards the Directive leadership style. It can be seen that many people in the community do not know about the development programs being carried out in the village, which results in a lack of participation from the community to be proactive in terms of development. Some of the policies made have not been on target. The village head of Makmur Jaya tends to a consultative leadership style, which can be seen from his initiative to provide space for the community and subordinates to convey their aspirations and ideas.

Keywords: Leadership Style, Decision Making, Planning/Organization.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanireahiim

Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah subhanahu waa ta'alaah yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan Tesis ini dengan sebaik mungkin. Salawat beriring penulis persembahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW keluarga beserta sahabatnya. Tesis ini merupakan ulasan tentang "Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan pada Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu. " sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Hasanuddin.

Dalam Kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua ku Bapak **Marsuki, S.Pd.** dan Ibu **Hj. Hastuti** yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang, serta ketulusan hati tanpa pamrih memberikan bantuan materil dan moril, selalu memberi semangat, berkat kekuatan doa luar biasa yang setiap saat beliau haturkan kepada penulis agar selalu mencapai kemudahan disegala urusan, serta Saudara-saudara ku **Hirayadi Marhas, Yuli Ayu Riska, S.Agr. Jordani Marhas, Asma UI Husna Putri Marhas, dan Gunawan Marhas**, semoga senantiasa diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Ketua Komisi Penasehat Bapak **Prof. Dr. Djuanda Nawawi, M.Si**, dan Anggota Komisi Penasehat Bapak **Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si**, atas segala arahan dan bantuannya sehingga Tesis ini dapat mencapai terselesaikan dengan baik. dimana dalam kesibukannya sehari-hari menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan, semoga kebaikan bapak berdua mendapat imbalan dari Allah Subhanahu waa Ta'ala.

Penulis menyadari sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam menyusun Tesis dalam bentuk sederhana sesuai dengan kemampuan yang dimiliki penulis. Namun masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dari segi kata-katanya, referensinya dan lain sebagainya. Meski demikian, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Dan tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga penulisan Tesis ini dapat diselesaikan. Sebagai akhir kata, terpendam suatu harapan semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi penulis-penulis dimasa yang akan datang. tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan oleh karena itu maka melalui kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si** selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan Magister (S-2) di Universitas Hasanuddin.

2. Bapak **Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya yang telah banyak memberikan bantuan serta masukan kepada penulis
3. **Dr. Andi Muhammad Rusli, M.Si.** selaku Plt. ketua Program Studi Magister ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan Ilmu politik dan seluruh staf pegawai di lingkungan Prodi Ilmu Pemerintahan atas segala saran dan masukan yang diberikan pada penulis selama perkuliahan
4. Para tim penguji Ibu **Prof. Dr. Nurlinah, M.Si**, Bapak **Prof. Dr. Suparman Abdullah, M.Si.** dan Bapak **Dr. Andi Muhammad Rusli, M.Si** yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam upaya penyempurnaan tesis ini.
5. Para Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Pemerintahan, Bapak **Prof. Dr. Rasyid Thaha, M.Si.**, Ibu **Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si.**, Bapak **Prof. Dr. Armin, M.Si**, Ibu **Dr. Indar Arifin, M.Si**, Bapak **Dr. Jayadi Nas, M.Si.** dan Bapak **Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si**, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan semoga bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh Pegawai/Staf Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan ilmu, nasehat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
7. Terima Kasih kepada Seluruh informan penulis serta semua yang terlibat dalam pengumpulan data maupun informasi yang menunjang penelitian ini.

8. Kepada seluruh rekan seperjuangan Magister Ilmu Pemerintahan Angkatan 2021/1 Kak **Novita Sari Basmin, S.IP., M.Si.**, Kak **Ramdany Utami Putri, S.IP., M.Si.** Saudara **Arfan, S.AP., M.Si.**, Saudara **Jum Harianto Fatman, S.IP., M.Si.**, Saudara **Kemal Pasha, S.E., M.Si.**, Saudara **Moh. Rivaldin A. Tadda, S.IP., M.Si.**, Saudara **Muhammad Gemilang Pagessa, S.Tr.Sos., M.Si.**, dan Saudara **Musakkar, S.IP., M.Si.**, terima kasih atas kerjasama dan kebersamaannya selama ini.
9. Kepada seluruh keluarga besar yang telah banyak memberikan support baik itu moril dan materil, terima kasih banyak penulis ucapkan.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima Kasih, Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis

Fatur R. H. Marhas

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	I
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Kepemimpinan	16
2.1.1 Definisi Kepemimpinan	16
2.1.2 Gaya Kepemimpinan	24
2.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gaya Kepemimpinan	40 40
2.3 Desa dan Pembangunan	43
2.3.1 Sejarah dan Pengertian Desa.	43
2.3.2 Pembangunan	50
2.3.3 Dinamika Pembangunan Desa	55
2.4 Penelitian Terdahulu	58
2.5 Kerangka Pikir	62
BAB III METODE PENELITIAN	65
3.1 Pendekatan Dan Jenis Penelitian	65
3.2 Lokasi penelitian	65

3.3 Fokus Penelitian	66
3.4 Sumber Data	68
3.5 Teknik Pengumpulan Data	68
3.6 Teknik Analisis Data	70
BAB IV HASIL PENELITIAN	72
4.1 Gambaran Umum kecamatan Tikke Raya	72
4.1.1 Sejarah Kecamatan Tikke Raya	72
4.1.2 Kondisi Geografis	73
4.1.3 Pemerintahan	76
4.1.4 Kondisi Demografi	77
4.1.5 Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	79
4.2 Profil Desa Makmur Jaya dan Desa Pajalele	82
4.3 Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan	106
4.3.1 Gaya Kepemimpinan Direktif	107
4.3.2 Gaya kepemimpinan Konsultatif	116
4.3.3 Gaya Kepemimpinana Partisipatif	124
4.3.4 Gaya Kepemimpinana Delegatif	133
4.4 Faktor Yang Mempengaruhi gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembanguna	142
4.4.1 Faktor Pengetahuan	144
4.4.2 Faktor Kemampuan	147
4.4.3 Faktor Pengalaman Kerja	149
4.4.4 Faktor Kepribadian	151
BAB V PENUTUP	156
5.1 Kesimpulan	156
5.2 Saran	158
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1	Anggaran Pendapatan Perubahan Desa Pajalele dan Desa Makmur Jaya Tahun 2021	6
1.2	Anggaran Belanja Perubahan Desa Pajalele Sub Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2021	7
1.3	Realisasi APBDes Pajalele Tahun 2021 Sub Bidang Pelaksanaan Pembangunan	8
1.4	Anggaran Belanja Desa Makmur Jaya Sub Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2021	9
1.5	Realisasi APBDes Makmur Jaya Tahun 2021 Sub Bidang Pelaksanaan Pembangunan	10
2.1	Daftar Penelitian Terdahulu	51
4.1	Daftar camat kecamatan Tikke Raya	66
4.2	Daftar Desa dan Dusun Kecamatan Tikke Raya	67
4.3	Daftar Kependudukan Kecamatan Tikke Raya	68
4.4	Daftar Sarana Rumah Ibadah Kecamatan Tikke Raya	70
4.5	Daftar Sarana Pendidikan Kecamatan Tikke Raya	70
4.6	Daftar Sarana Olahraga Kecamatan Tikke Raya	71
4.7	Daftar Kepala Desa Makmur Jaya dari Masa ke Masa	73
4.8	Jumlah Penduduk Desa Makmur Jaya	75
4.9	Jumlah penduduk Desa Makmur Jaya Berdasarkan Dusun	76
4.10	Jumlah penduduk Desa Makmur Jaya Berdasarkan Agama	79
4.11	Luas area produksi area pertanian Desa Makmur Jaya	80
4.12	Mata Pecaharian penduduk Desa Makmur Jaya	81
4.13	Prasana umum Desa Makmur Jaya	82
4.14	Daftar Sarana Pendidikan Desa Makmur Jaya	83
4.15	Daftar RT dalam Dusun Desa Makmur Jaya	84
4.16	Daftar Kepala Desa Pajalele dari masa ke masa	86
4.17	Jumlah Penduduk Desa Pajalele	89

4.18	Jumlah Sarana Ibadah Desa Pajalele	91
4.19	Jumlah Penduduk Desa Pajalele	92
4.20	Daftar Sarana Prasarana Desa Pajalele	92
4.21	Pembagian wilayah Desa Pajalele	94

DAFTAR GAMBAR

2.1	Gambar Struktur Organisasi Pemerintah Desa	40
2.2	Gambar Bagan Kerangka Pikir	56
4.1	Peta Kecamatan Tikke Raya	63
4.2	Grafik Luas wilayah Desa Kecamatan Tikke Raya	64
4.3	Grafik Luas dan penggunaan Tanah	66
4.4	Grafik Persentase Jumlah Penduduk Kecamatan Tikke	68
4.5	Persentase Ketenagakerjaan Kecamatan Tikke Raya	69
4.6	Struktur Organissi Desa Makmur Jaya	85
4.7	Struktur Organisasi Desa Pajalele	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat. Pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Hal ini sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta menjalankan roda perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan sosial.

Kepemimpinan kepala desa menentukan arah dan tujuan pembangunan desa itu sendiri. Pembangunan yang ada di suatu desa harus melibatkan masyarakat dan aparatur pemerintah lainnya. pembangunan di daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berdasarkan otonomi daerah dengan pelaksanaan untuk membuat masyarakat di daerah mandiri dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Kepemimpinan sebagai cara untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan sebagai alat dan sarana

untuk membujuk orang agar mau melakukan sesuatu secara tidak terpaksa.

Kepemimpinan kepala desa sebagai pimpinan penyelenggara pemerintahan yang ada di desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama badan permusyawaratan desa (BPD). Kepala desa sebagai pimpinan lembaga eksekutif yang berada di desa dengan dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan kewajibannya. Kepemimpinan kepala desa sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman agar masyarakat mengetahui kewajiban dalam pembangunan desa, dalam hal ini tertuang pada Undang- Undang No. 6 tahun 2014 yaitu:

- 1) Pemerintahan Desa bertujuan penyelenggaraan sistem pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat belandaskan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai aktor penyelenggara pemerintahan desa.
- 3) Pemberdayaan masyarakat desa upaya upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan

kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Kinerja seorang kepala desa sebagai kepala pemerintahan dituntut untuk menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa. Dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga, pemerintahan desa, melakukan pembinaan dan pembangunan perekonomian masyarakat desa. Disisi lain, kepemimpinan kepala desa merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam melakukan pembangunan, desa dalam hal ini adalah organisasi yang dipengaruhi oleh pemimpin keadaan ini sesuai dengan pendapat Hasibuan (2003:170) "Kepemimpinan adalah cara pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang telah di tentukan sebelumnya".

Kepemimpinan merupakan sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan, untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, sertja merasa tidak terpaksa.

Salah satu tantangan yang besar yang dihadapi seorang pemimpin adalah bagaimana ia menggerakkan bawahannya agar senantiasa mau mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk kepentingan organisasi. Sering kali kita melihat seorang pemimpin menggunakan kekuasaannya secara mutlak dengan memerintah bawahannya tanpa melihat keadaan bawahannya.

Wilayah negara kesatuan RI terbagi atas daerah provinsi, dan provinsi terbagi atas daerah yang lebih kecil yaitu Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa sampai Kelurahan. Daerah-daerah tersebut menjadi satu kesatuan dalam wilayah nagara RI. Oleh karena itu pembangunan harus tersebar secara merata dari seluruh wilayah Republik Indonesia agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.

Sosok kepemimpinan dituntut untuk profesional dan menguasai secara baik pekerjaannya melebihi rata-rata pegawai yang ada, serta memiliki komitmen moral yang tinggi atas pekerjaannya sesuai dengan kode etik profesinya sebagai pemimpin. Pemimpin/Kepemimpinan merupakan subjek yang harus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui tuntutan dan

anjuran serta pengambil keputusan yang efektif kepada masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan.

Pada dasarnya beban kepala desa tidaklah ringan, sebagaimana hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 pada tentang Desa bagian Pemerintah Desa dijelaskan bahwa Pemerintah desa atau disebut dengan nama lain kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan permusyawaratan desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Desa Pajalele merupakan suatu Desa yang dimana masyarakatnya membutuhkan sosok seorang pimpinan yang mampu melihat keadaan situasi dan kondisi desanya. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut khususnya dalam penataan desa sangat dibutuhkan suatu kebijakan seorang pimpinan yang tepat dan akurat sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Pembanguna Desa akan terwujud dengan adanya keikutsertaan masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang ada didesanya. Karean dasarnya pembangunan desa membutuhkan kerjasama dari masyarakat, seperti halnya Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa Bab IX tentang

pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan pasal 78 ayat 3 yaitu pembangunan Desa sebagaimana dimaksud mengedepankan kebersamaan,kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan persatuan perdamaian dankeadilan sosia.

Dari sekian banyak pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu. Peneliti tertarik untuk mengamati Proses penyelenggaraan pembangunan yang ada di Desa Makmur Jaya dan Desa Pajalele yang keduanya memiliki alokasi dana yang sama yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), Penulis menggambarkan bahwa kedua sumber tersebut terdapat didalam rancangan Belanja Desa (RPBDes) dan kemudian menjadi Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) didalam Sub Penyelenggaraan Pembangunan Terdapat perbedaan alokasi dan realisasi, serta proses transparansi Penggunaan Realisasi yang berbeda pula, secara rinci dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Anggaran Pendapatan Perubahan Desa Pajalele dan Desa Makmur Jaya Tahun 2021

No	Sumber	Anggaran	
		Desa Pajalele	Desa Makmur Jaya
1	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 720.270.000	Rp. 712.372.000
2	Dana Desa (DD)	Rp. 1.041.238.000	Rp. 1.319.347.000

No	Sumber	Anggaran	
		Desa Pajalele	Desa Makmur Jaya
3	Pendapatan Bagi Hasil (PBH)	Rp. 12.302.000	Rp. 12.310.000
4	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp. 17.888.458	Rp. 6.055.347
5	Bunga Uang	Rp. 444.015	Rp. 5.900.000
6	Silpa Tahun Sebelumnya	Rp. 7.139.600	Rp. 155.036.500
Total Pendapatan		Rp. 1.799.327.073	Rp.2.044.029.000

(Baliho transparansi APBDes Perubahan Tahun 2021 Desa Pajalele dan Desa Makmur Jaya)

Dalam table tersebut merincikan Sumber pendapatan Desa Pajalele dan Desa Makmur Jaya pada tahun 2021 dengan 6 jenis sumber anggaran terlihat perbedaan dana yang cukup jauh dari keduanya dari anggaran tersebut kemudian kita akan melihat rincian pengalokasian dana untuk Sub Pelaksanaan Pembangunan Desa Pajalele pada table berikut:

Tabel 1.2 Anggaran Belanja Perubahan Desa Pajalele Sub Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2021

No	Bilang Pelaksanaan Pembangunan	Anggaran
1	Insentif Guru PAUD dan Mengaji	Rp.37.800,000,-
2	Kegiatan Kesehatan di Desa	Rp.17.350.000,-
3	Penyelenggaraan Posyandu	Rp.61.313.000,-
4	Penyelenggaraan Desa Siaga Covid	Rp.60.365.000,-
5	Normalisasi Parit	Rp.78.700.000,-

No	Bilang Pelaksanaan Pembangunan	Anggaran
6	Normalisasi Parit	Rp.11.000.000,-
7	Peningkatan jalan Rambutan	Rp.60.200.000,-
8	Peningkatan Jalan Nangka	Rp.36.700.000,-
9	Peningkatan Jalan Tani	Rp.55.000.000,-
10	Peningkatan Jalan Tani	Rp.55.000.000,-
11	Pembangunan drainase	Rp.73.800.000,-
12	Baliho Transparansi APBDes Pokok	Rp.750.000,-
13	Baliho Transparansi APBDes Perubahan	Rp.750.000,-
14	Baliho Transparansi APBDes Realisasi	Rp.750.000,-
Jumlah		549.748.000

(Baliho transparansi APBDes Perubahan Tahun 2021 Desa Pajalele)

Dari rincian Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa dipajalele terdapat 14 item Pelaksanaan dengan total anggaran yaitu sebesar 549.748.00 namun dalam baliho transparansi realisasi pelaksanaan pembangunan tidak terperinci secara jelas dapat kita lihat dalam tabel berikut;

Tabel 1.3 Realisasi APBDes Pajalele Tahun 2021 Sub Bidang Pelaksanaan Pembangunan

No	Sub Bidang Pelaksanaan	Anggaran	Realisasi	Kurang/ Lebih
1	Bidang Pendidikan	Rp.37.800.000	Rp.37.800.000	

No	Sub Bidang Pelaksanaan	Anggaran	Realisasi	Kurang/ Lebih
2	Bidang Kesehatan	Rp.139.298.000	Rp.139.298.000	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp.159.400.000	Rp.159.400.000	
4	Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Desa.	Rp.2.250.000	Rp.2.250.000	
Total		549.748.000	549.748.000	

(Baliho Transparansi Realisasi APBDes Pajalele tahun 2021)

Kepala Desa Pajalele hanya mengalokasikan sebesar 549.748.000 untuk Program Pelaksanaan pembangunan dari total dana Rp. 1.799.327.073, berbeda dengan Desa Makmur Jaya yang mengalokasikan sebesar 1.102.192.000 untuk sub bidang pelaksanaan pembangunan Desa jumlah tersebut cukup berbeda jauh dengan dana yang dialokasikan Desa Pajalele dalam sub bidang pelaksanaan Desa secara rinci dapat kita lihat pada table berikut:

Tabel 1.4 Anggaran Belanja Desa Makmur Jaya Sub Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2021

No	Bilang Pelaksanaan Pembangunan	Anggaran
1	Penyelenggaraan PAud TK/TPA/Sekolah minggu	Rp.79.800.000
2	Pembangunan TPA Dusun Bumi Jaya	Rp. 91.726.000
3	Pengelolaan Perpustakaan	Rp. 1.200.000
4	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	Rp. 42.250.000
5	Penyelenggaraan Posyandu	Rp. 99,270,000
6	Edukasi dan Sosialisasi pencegahan dan penanganan covid-19	Rp. 31,460,000
7	Penyediaan tempat cuci tangan dan handzinitizer sarana public	Rp. 25,590,000
8	Penyemprotan cairan disinfektan	Rp. 9,000,000
9	Secretariat Satgas penanganan covid-19 di Desa	Rp. 8,384,000
10	Bantuan sembako bagi keluarga yang isolasi mandiri	Rp. 4,500.000
11	Rehab plafon Posyandu Manggis	Rp. 3,062,000
12	Pemeliharaan jalan tani	Rp. 12,400,000
13	Pemeliharaan jalan rambutan	Rp. 14,100,000
14	Pemeliharaan jalan badak	Rp. 2,500,000
15	Pemeliharaan jalan Anoa	Rp. 15,600,000
16	Pemeliharaan jalan kijang	Rp. 8,900,000
17	Normalisasi Saluran air parit dusun maradde	Rp. 14.500,000
18	Normalisasi Saluran air parit dusun kaya makmur	Rp. 32,850,000
19	Normalisasi saluran air drainase dusun letawa	Rp. 1,300,000
20	Pembukaan jalan domba	Rp. 32,850,000

No	Bilang Pelaksanaan Pembangunan	Anggaran
21	Peningkatan jalan tawaro	Rp. 26,700,000
22	Peningkatan jalan tani kijang	Rp. 101,700,000
23	Rehab jembatan dusun maradde	Rp. 39,945,000
24	Pembangunan drainase jalan anoa	Rp. 53,176,000
25	Pembangunan plat ducker dusun karya makmur	Rp. 8,672,000
26	Pembangunan plat ducker dusun karya makmur	Rp. 13,917.000
27	Pembangunan drainase dusun bumi jaya	Rp. 289.040.000
28	Penyelenggaraan informasi Publik Desa	Rp. 2.250.000
Total		1,102,192,000

(Baliho Transparansi APBDes Makmur Jaya Tahun 2021)

Pada rincian Anggran Pendapatan dan belanja Desa Sub bidang pelaksanaan pembangunanan Desa Makmur Jaya tahun 2021 terdapat 28 item dengan total dana sebesar 1.102,192,000 dan selaras dengan rincian Realisasi APBDes seperti yang kita lihat pada table berikut:

Tabel 1.5 Realisasi APBDes Makmur Jaya Tahun 2021 Sub Bidang Pelaksanaan Pembangunan

No	Bilang Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	Surplus/ Defist
1	Penyelenggaraan PAud TK/TPA/Sekolah minggu	Rp.79.800.000	Rp.79.800.000	-
2	Pembangunan TPA	Rp. 91.726.000	Rp.90,226,000	Rp.1.500.000

No	Bilang Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	Surplus/ Defist
	Dusun Bumi Jaya			
3	Pengelolaan Perpustakaan	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000	-
4	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	Rp. 42.250.000	Rp.42.250.000	-
5	Penyelenggaraan Posyandu	Rp. 99,270,000	Rp.76,770,000	Rp.22,500,000
6	Edukasi dan Sosialisasi pencegahan dan penanganan covid-19	Rp. 31,460,000	Rp.29,860,000	Rp.1.600,000
7	Penyediaan tempat cuci tangan dan handzinitizer sarana public	Rp. 25,590,000	Rp.18,570,000	Rp,7,020,000
8	Penyemprotan cairan disinfektan	Rp. 9,000,000	Rp. 9,000,000	-
9	Secretariat Satgas penanganan covid-19 di Desa	Rp. 8,384,000	Rp. 8,384,000	-
10	Bantuan sembako bagi keluarga yang isolasi mandiri	Rp. 4,500.000	Rp,1,200,000	Rp,3,300,000
11	Rehab plafon Posyandu Manggis	Rp. 3,062,000	Rp. 3,062,000	
12	Pemeliharaan jalan tani	Rp. 12,400,000	Rp.12,400,000	
13	Pemeliharaan jalan rambutan	Rp. 14,100,000	Rp.14,100,000	
14	Pemeliharaan jalan badak	Rp. 2,500,000	Rp. 2,500,000	
15	Pemeliharaan jalan Anoa	Rp. 15,600,000	Rp.15,600,000	
16	Pemeliharaan jalan kijang	Rp. 8,900,000	Rp. 8,900,000	
17	Normalisasi Saluran air parit dusun maradde	Rp. 14.500,000	Rp.14.500,000	
18	Normalisasi Saluran air parit	Rp. 32,850,000	Rp.32,850,000	

No	Bilang Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	Surplus/ Defist
	dusun kaya makmur			
19	Normalisasi saluran air drainase dusun letawa	Rp. 1,300,000	Rp. 1,300,000	
20	Pembukaan jalan domba	Rp.32,850,000	Rp.32,850,000	
21	Peningkatan jalan tawaro	Rp.26,700,000	Rp.26,700,000	
22	Peningkatan jalan tani kijang	101,700,000	101,700,000	
23	Rehab jembatan dusun maradde	Rp.39,945,000	Rp.39,945,000	
24	Pembangunan drainase jalan anoa	Rp.53,176,000	Rp.53,176,000	
25	Pembangunan plat ducker dusun karya makmur	Rp. 8,672,000	Rp. 8,672,000	
26	Pembangunan plat ducker dusun karya makmur	Rp.13,917.000	Rp.13,917.000	
27	Pembangunan drainase dusun bumi jaya	289.040.000	289.040.000	
28	Penyelenggaraan informasi Publik Desa	Rp. 2.250.000	Rp. 2.250.000	
Total		1,102,192,000	1,066,272,000	35,920,000

(Baliho Transparansi Realisasi APBDes Pajalele tahun 2021)

Berdasarkan data Penyelenggaran pembangunan yang tertuang pada Draf Anggaran dan pendapatan Belanja Desa Pajalele dan Desa Makmur Jaya terdapat perbedaan transparansi Realisasi APBDes dan pelaksanaan Sub Bidang pelaksanaan pembangunan yang notabene memiliki Regulasi yang sama, berdasarkan

pemaparan penulis diatas, penulis tertarik untuk melaksanakan suatu penelitian tentang seperti apa Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh masing-masing Kepala Desa dalam hal penyelenggaraan Pembangunan, maka judul yang penulis angkat ialah **“Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan di Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu”**.

1.2 Rumusan Masalah.

Kepemimpinan Kepala Desa dalam pembangunan diukur dengan melihat dan menganalisis gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Kepala Desa. Untuk mengarahkan penelitian ini maka pertanyaan penelitian disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa yang diterapkan dalam Pembangunan di kecamatan Tikke Raya, Kabupaten pasangkayu?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi gaya kepemimpinan Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah beradasar pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan gaya kepemimpinan Kepala desa dalam pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten pasangkayu.
2. Untuk menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai karya ilmiah yang menunjang perkembangan ilmu pengetahuan khususnya perkembangan ilmu Pemerintahan Desa
2. Secara praktis, penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kepala Desa yang ada di Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu Dalam Melaksanakan pembangunan.
3. Secara metodologi, penelitian diharapkan sebagai bahan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama khususnya terkait gaya kepemimpinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepemimpinan

2.1.1 Definisi Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan. Ilmu kepemimpinan telah semakin berkembang seiring dengan dinamika perkembangan hidup manusia.

Istilah Kepemimpinan (*Leadership*) adalah kata yang diambil dari kosa kata yang umum dipakai dan diamsukkan kedalam kosa kata teknis bidang ilmu tertentu tanpa didefinisikan kembali secara tepat. Karena itu, kata ini memiliki konotasi yang tidak relevan sehingga menciptakan makna yang ambigu (Janda, 1990:190)

Stephen P. Robbins dalam Irham Fahmi (2017:21), kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok kearah tercapinya tujuan. Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan sebagai sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk orang lain agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela.ada beberapa faktor yang dapat menggerakkan orang yaitu ancaman, penghargaan, otoritas dan bujukan.

George R. Terry (Kartini Kartono, 1982:57), kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka suka berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok. Kepemimpinan juga dikatakan sebagai proses mengarahkan dan memengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Tiga implikasi penting yang terkandung dalam hal ini yaitu : 1) kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun pengikut, 2) kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang, karena anggota bukanlah tanpa daya, 3) adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi tingkah pengikutnya melalui berbagai cara. (Veithzal Rivai, 2002:3)

Yulk (Pasolog 2013:14) mengatakan bahwa kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi, yang mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa bagi para pengikut, pilihan dari sasaran bagi kelompok atau birokrasi, pengorganisasian dari aktivis-aktivis kerja untuk menggapai sasaran-sasaran tersebut, motivasi dari para pengikut untuk mencapai sasaran, pemeliharaan hubungan kerjasama dan teamwork, serta perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang yang berada diluar kelompok atau birokrasi.

Motivasi dari para pengikut untuk mencapai sasaran, pemeliharaan hubungan kerjasama dan teamwork, serta perolehan

dukungan dan kerja sama dari orang-orang yang berada diluar kelompok atau birokrasi.

Henry Pratt Fairchild dalam Kartini Kartono (1992:56) menyatakan Pemimpin dalam pengertian luas ialah seseorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan tingkah laku sosial, mengorganisir/mengontrol usaha atau upaya orang lain, atau melalui prestise kekuasaan atau posisi. Dalam pengertian yang terbatas Pemimpin ialah seorang yang membimbing memimpin dengan bantuan kualitas-kualtas persuasifnya, dan akseptansi/penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya.

Rivai (2014:4) konsep kepemimpinan erat sekali hubungannya dengan kekuasaan pemimpin dalam memperoleh alat untuk mempengaruhi perilaku para pengikutnya. Terdapat beberapa sumber dan bentuk kekuasaan yaitu kekuasaan paksaan, legitimasi, keahlian, penghargaan, referensi, informasi, dan hubungan. Pada dasarnya kemampuan untuk mempengaruhi orang atau suatu kelompok untuk mencapai tujuan tersebut ada unsur kekuasaan. Kekuasaan tak lain adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mau melakukan apa yang diinginkan oleh pihak lainnya. Praktik kepemimpinan berkaitan dengan mempengaruhi tingkah laku dan perasaan orang lain baik secara individual maupun kelompok dalam araha tertentu, sehingga melalui kepemimpinan merujuk pada

proses untuk membantu mengarahkan dan memobilisasi orang atau ide-idenya.

Kartini Kartono (1992:56) Kepemimpinan tidak lagi didasarkan pada bakat dan pengalaman saja, tetapi pada penyiapan secara berencana, melatih calon-calon pemimpin. Semuanya dilakukan lewat perencanaan, penyelidikan, percobaan/eksperimen, analisis, supervise dan penggemblengan secara sistematis untuk membangkitkan sifat-sifat pemimpin yang unggul, agar mereka berhasil dalam tugas-tugasnya. Niali kepemimpinannya tidak lagi ditentukan oleh bakat alamnya akan tetapi oleh kemampuannya menggerakkan banyak orang melakukan satu karya bersama, berkat pengaruh kepemimpinnya yang diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan.

Miftah Thoha (2015:9) Kepemimpinan bisa saja karena berusaha mencapai tujuan seseorang atau kelompok, dan bisa saja sama atau tidak selaras dengan tujuan organisasi. Dalam arti yang luas kepemimpinan dapat digunakan setiap orang dan tidak hanya terbatas berlaku dalam suatu organisasi atau kantor tertentu. Seperti yang dikemukakan dalam beberapa rumusan pengertian diatas dan beberapa rumusan lain bahwa kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok.

2.1.1.2 Kepemimpinan Dalam Pelaksanaan Kewenangan Lokal Skala

Desa

Desa memiliki kewenangan-kewenangan sebagaimana diatur oleh UU Desa, merujuk pada pasal 19 huruf a dan b UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut yang dimaksud dengan menyebutkan kewenangan Desa, antara lain kewenangan tersebut adalah kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa.

Kewenangan lokal berskala Desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.

Selain itu, UU Desa juga merinci kewenangan lokal berskala Desa yang antara lain meliputi; bidang pemerintahan Desa, pembangunan Desa, kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Permen Desa PDTT (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) RI Nomor 1 tahun 2015 tentang

Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa mengatur lebih rinci apa saja kewenangan lokal skala Desa itu. Di bidang pemerintahan Desa, kewenangan lokal skala Desa meliputi; penetapan dan penegasan batas Desa; pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa; penetapan organisasi Pemerintah Desa; penetapan BUM Desa; penetapan APB Desa; penetapan peraturan Desa dan lain sebagainya.

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa, meliputi; pelayanan dasar Desa; sarana dan prasarana Desa; pengembangan ekonomi lokal Desa; dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

Bidang kemasyarakatan Desa kewenangan lokal berskala Desa meliputi; membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa; membina kerukunan warga masyarakat Desa; memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.

Sedangkan kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat antara lain; pengembangan seni budaya lokal; pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat; fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok

masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel dan lain-lain.

Berdasarkan pembagian tipe kepemimpinan di Desa, sikap atau pola yang akan dilakukan dalam melaksanakan kewenangan lokal skala Desa antara lain sebagai berikut (Zaini Mustakim 2015:14);

1. Pemerintahan Desa, Menurut tipe kepemimpinan regresif adalah dirinya sendiri, tidak ada orang lain dan apa yang diucapkan olehnya dianggap keputusan Desa dan harus dipatuhi, bahasa lainnya sabdo pandito ratu. Selain itu, kepemimpinan ini sering kali menolak untuk transparan, tidak ada mekanisme pertanggungjawaban kepada publik. Sementara, kepemimpinan konservatif-involutif memaknai pemerintahan cenderung Normatif serta prosedural. Menjalankan pemerintahan sesuai prosedur yang ada, dalam hal akuntabilitas tipe kepemimpinan ini hanya membuat dokumen laporan pertanggungjawaban, dalam hal transparansi penyelenggaraan pemerintahan biasanya hanya mengikuti tata tertib yang sudah ada. Sedangkan tipe kepemimpinan inovatif-progresif memaknai pemerintahan Desa sebagai proses menjalankan pemerintahan yang melibatkan partisipasi/prakarsa masyarakat, transparan serta mengedepankan akuntabilitas kinerja.
2. Pembangunan Desa. Rangkaian kegiatan pembangunan Desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan.

Pada kepemimpinan regresif pembangunan Desa harus sesuai dengan kemauannya, program pembangunan diarahkan untuk kesejahteraan dirinya sendiri. Sementara kepemimpinan konservatif-involutif akan melaksanakan pembangunan Desa sesuai mekanisme perencanaan pembangunan yang sudah ada dan yang penting baginya terdapat dokumen perencanaan program pembangunan. Sedangkan kepemimpinan inovatif-progresif, pembangunan Desa dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari merencanakan, melaksanakan serta mengawasi proyek pembangunan.

3. Kemasyarakatan Desa. Kewenangan lokal skala Desa dalam hal ini adalah pelaksanaan tanggung jawab Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban. Pada kepemimpinan regresif, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Desa ditangani oleh dirinya sendiri, pemimpin ini akan mengontrol kehidupan masyarakat Desa, bila terdapat masyarakat yang dianggap meresahkan dirinya sendiri akan ditindak, diintimidasi. Tipe kepemimpinan konservatif-involutif dalam hal menjaga ketentraman dan ketertiban di Desa secara prosedural akan dilaksanakan dengan cara koordinasi dengan kepolisian maupun Babinsa. Sedangkan pada tipe kepemimpinan inovatif-progresif akan melibatkan seluruh unsur masyarakat termasuk untuk bersama-sama menjaga ketentraman dan ketertiban Desa.

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sebagaimana kewenangan lokal skala Desa pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan jalan mendampingi masyarakat agar berdaya. Pada kepemimpinan regresif biasanya menolak untuk mendampingi masyarakat Desa, masyarakat yang berdaya dianggap mengancam posisinya. Kepemimpinan konservatif-involutif hanya akan memberdayakan keluarga, kerabat atau warga masyarakat yang dapat dikendalikan olehnya. Sedangkan kepemimpinan inovatif-progresif akan melakukan pemberdayaan Desa dengan memunculkan prakarsa masyarakat, selain itu tipe kepemimpinan ini akan melakukan kaderisasi dan menyiapkan Kader-kader Desa serta membuka akses untuk peningkatan kapasitas masyarakat Desa.

2.1.2 Gaya Kepemimpinan

Berbicara tentang gaya kepemimpinan sebenarnya kita berbicara tentang bagaimana pemimpin menjalankan tugas kepemimpinannya, misalnya gaya apa yang dipakai dalam merencanakan, merumuskan dan menyampaikan perintah perintah/ajakan-ajakan kepada yang diperintah. Menurut Thoha dalam Pasolong (2008:32) gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Sedangkan menurut Ermaya dalam Pasolong (2008:37) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan merupakan bagaimana cara mengendalikan bawahan

untuk melaksanakan sesuatu. Dari pendapat para ahli tersebut Pasolong menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang dipergunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi, mengarahkan, mendorong dan mengendalikan bawahannya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Berbeda dengan Kartono yang mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan adalah sifat, kebiasaan, temperamen, watak dan kepribadian sendiri yang unik khas sehingga tingkah laku dan gayanya yang membedakan dengan orang lain. Sedangkan, Rivai mendefinisikan gaya kepemimpinan sebagai suatu pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin.

Adapun gaya kepemimpinan menurut Pamudji (1986:122-125) yakni sebagai berikut:

1. Gaya Motivasi, Yaitu pemimpin yang dalam menggerakkan orang-orang dengan mempergunakan motivasi yang baik berupa imbalan ekonomis, dengan memberikan hadiah (rewards), jadi bersifat positif maupun berupa ancaman (penalties) jadi bersifat negatif.
2. Gaya Kekuasaan, Yaitu pemimpin yang cenderung menggunakan kekuasaan untuk menggerakkan orang-orang. Dalam hubungannya dengan gaya ini dapat dibedakan yaitu:
 - a. Gaya Otokratik Sering juga di sebut gaya kepemimpinan otoritarian, yaitu pemimpin yang menggantungkan kepada

kekuasaan formal, organisasi dipandang sebagai milik pribadi, mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi.

- b. Gaya Partisipatif Gaya ini juga sering disebut dengan gaya demokratik, yaitu pemimpin memandang manusia adalah makhluk yang bermartabat dan harus dihormati hak-haknya.
- c. Gaya Bebas Yaitu gaya yang hanya mengikuti kemauan pengikut, menghindarkan diri dari penggunaan paksaan atau tekanan.

3. Gaya Pengawasan, Yaitu kepemimpinan yang dilandaskan kepada perhatian seorang pimpinan terhadap perilaku kelompok. Gaya pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Berorientasi kepada pegawai Yaitu pemimpin selalu memperhatikan anak buahnya sebagai manusia yang bermartabat, pemimpin mengakui kebutuhan pengikut-pengikutnya dan menghormati kemanusiaan mereka.
- b. Berorientasi kepada produksi Yaitu pemimpin selalu memperhatikan proses produksi serta metode-metodenya.

Gaya kepemimpinan menurut White & Lippit dalam Arifin syamsul (2014:89-93) dapat diklasifikasikan kedalam 8 Gaya kepemimpinan, yakni:

- 1. Gaya Karismatis, Gaya ini memiliki kekuatan energi, daya tarik dan perbawa yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan

pengawal-pengawal yang bisa di percaya. Dia dianggap mempunyai kekuatan ghaib (supernatural power) dan kemampuan-kemampuan yang superhuman, yang diperolehnya sebagai karunia yang mahakuasa. Dia banyak memiliki inspirasi, keberanian, dan berkeyakinan teguh pada pendirian sendiri. Totalitas kepribadian pemimpin itu memancarkan pengaruh dan daya tarik yang teramat besar. Kepemimpinan kharismatik memiliki kebutuhan kuat akan kekuasaan (strong need for power), memiliki percaya diri yang tinggi (high self confidence) dan pendirian (prinsip) yang kuat pula dalam mewujudkan kepercayaan dan idealitasnya (strong conviction in their own belief and ideals). Dalam gaya kepemimpinan ini, terdapat beberapa indikator, yakni:

- a. Pengikut-pengikutnya menyakini kebenarannya dalam acara memimpin.
- b. Pengikut-pengikutnya menerima gaya kepemimpinannya tanpa bertanya.
- c. Pengikut-pengikutnya memiliki kasih sayang kepada pemimpinnya.
- d. Kesadaran untuk mematuhi perintah pemimpinnya.
- e. Dalam mewujudkan misi organisasi melibatkan pengikutnya secara emosional.
- f. Dipercayai pengikutnya bahwa dengan gaya kepemimpinan apapun akan mampu mewujudkan misi organisasinya.

2. Gaya Peternalistis, Gaya kepemimpinan yang kebapakan, tipe pemimpin yang paternalistik banyak terdapat di lingkungan masyarakat yang masih bersifat tradisional, umumnya di masyarakat yang agraris. Popularitas pemimpin yang pater-nalistik di lingkungan masyarakat demikian disebabkan oleh faktor seperti kuatnya ikatan primordial, extended family system, kehidupan masyarakat yang komunalistik, peranan adat istiadat yang sangat kuat dalam kehidupan bermasyarakat, masih dimungkinkannya hubungan pribadi yang intim antara seseorang anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lainnya. Gaya kepemimpinan yang meternalistis mirip dengan gaya paternalistis, perbedaannya hanya pada adanya sikap over-protective atau terlalu melindungi yang lebih menonjol, disertai kasih sayang yang berlebihan. Adapun sifat-sifat antara lain sebagai berikut:

- a. Menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak/belum dewasa, atau anak sendiri yang perlu dikembangkan.
- b. Bersikap terlalu melindungi.
- c. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan sendiri.
- d. Hampir tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif.

e. Hampir tidak memberikan kesempatan pada pengikut dan bawahan untuk mengembangkan imajinasi dan daya kreativitas mereka sendiri.

f. Selalu bersikap maha-tahu dan maha-benar.

3. Gaya Militeristis Seorang pemimpin dengan tipe militeristis tidak berarti selalu seorang pemimpin dari organisasi militer. Seorang pemimpin yang bertipe militeristis adalah seorang pemimpin yang memiliki ciri-ciri dalam kepemimpinannya sebagai berikut :

a. Dalam menggerakkan bawahannya lebih sering mempergunakan sistem perintah.

b. Dalam menggerakkan bawahan senang bergantung pada pangkat dan jabatannya.

c. Senang pada formalitas yang berlebih-lebihan.

d. Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan.

e. Sukar menerima kritik dari bawahannya.

f. Menggemari upacara-upacara untuk berbagai kegiatan.

4. Gaya Otokratis

Otokrat berasal dari perkataan autos = sendiri, dan kratos = kekuasaan, kekuatan. Jadi otokrat berarti penguasa absolut. Kepemimpinan otokratis itu mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus dipatuhi. Pemimpinnya selalu mau berperan sebagai pemain tunggal pada a one-man show. Dia berambisi sekali untuk merajai situasi. Setiap perintah dan

kebijakan ditetapkan tanpa berkonsultasi dengan bawahannya. Anak buah tidak pernah diberi informasi mendetail mengenai rencana dan tindakan yang harus dilakukan. Semua pujian dan kritik terhadap segenap anak buah diberikan atas pertimbangan pribadi pemimpin sendiri.

Sikap dan prinsip-prinsipnya sangat konservatif/kuno dan ketatkaku. Dengan keras dia mempertahankan prinsip-prinsip business, efektivitas, efisiensi, dan hal-hal yang berkaitan. Maka authoritative itu disebut sebagai ketat-kaku berorientasi pada struktur dan tugas-tugas. Pemimpin mau bersikap “baik” terhadap bawahan, asal bawahan tadi bersedia patuh secara mutlak dan menyadari tempatnya sendiri-sendiri. Yang paling disukai ialah tipe pegawai dan buruh “hamba nan setia”. Adapun indikator-indikator kepemimpinannya otokratris adalah sebagai berikut:

- a. Kecenderungan memperlakukan para bawahannya sama dengan alat-alat lain dalam organisasi, seperti mesin, dan dengan demikian kurang menghargai harkat dan martabat mereka.
- b. Pengutamaan orientasi terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugas tanpa mengaitkan pelaksanaan tugas itu dengan kepentingan dan kebutuhan para bawahannya.
- c. Pengabaian peran para bawahan dalam proses pengambilan keputusan.

- d. Menuntut ketaatan penuh dari bawahannya.
- e. Dalam menegakkan disiplin menunjukkan kekakuannya.
- f. Bernada keras dalam pemberian perintah atau instruksi.
- g. Menggunakan pendekatan primitif dalam hal terjadinya penyimpangan oleh bawahan.

5. Gaya Laissez

Faire Laissez Faire sebenarnya adalah frasa bahasa perancis yang berarti "biarkan saja". Pada mulanya, istilah ini hanya digunakan sebagai doktrin ekonomi untuk menentang pemerintah agar tidak ikut campur dalam kegiatan perekonomian pasar bebas.

Pendukung doktrin ini berpendapat bahwa suatu perekonomian perusahaan swasta (private-enterprise economy) akan mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi dalam pengalokasian dan penggunaan sumber-sumber ekonomi yang langka dan akan mencapai pertumpuhan ekonomi yang lebih besar bila dibandingkan dengan perekonomian yang terencana secara terpusat (centrally planned economy). Kemudian istilah ini semakin berkembang sampai pada kegiatan politik.

Gaya kepemimpinan ini bebas mendeskripsikan pemimpin yang secara keseluruhan memberikan karyawannya atau kelompok kebebasan dalam pembuatan keputusan dan menyelesaikan pekerjaan menurut cara yang menurut karyawannya paling sesuai. kepemimpinan Laissez Faire adalah gaya kepemimpinan yang

membiarkan orang-orang berbuat sekehendaknya. Kepemimpinan Laissez Faire ditampilkan oleh seorang tokoh yang sebenarnya tidak becus mengurus dan dia menyerahkan semua tanggung jawab serta pekerjaan kepada bawahan atau semua anggotanya.

Pemimpin tipe Laissez Faire adalah seorang ketua yang bertindak sebagai simbol dengan macam-macam hiasan atau ornamen yang mentereng. Biasanya dia tidak memiliki keterampilan teknis. Adapun indikator gaya kepemimpinan Laissez Faire dalam peningkatan kinerja :

- a. Kebebasan penuh bagi keputusan kelompok atau individu dengan partisipasi minimal dari pemimpin.
- b. Bahan-bahan yang bermacam-macam disediakan oleh pemimpin yang membuat orang selalu siap bila dia akan memberi informasi saat ditanya.
- c. Sama sekali tidak ada partisipasi dari pemimpin dalam penentuan tugas.
- d. Kadang-kadang memberi komentar spontan terhadap kegiatan anggota atau pertanyaan dan tidak bermaksud menilai atau mengatur suatu kejadian.
- e. Tidak memberikan kontrol dan koreksi terhadap anggota-anggota kelompok.
- f. Keleluasaan dan tanggung jawab bersimpang siur.

- g. Tidak merata pada posisi para anggotanya dalam melaksanakan tugasnya.
- h. Kebijakan (policity) suatu institusi berada ditangan anggota.

6. Gaya Populistis

Professor Peter Worsley dalam bukunya *The Third World* mendefinisikan kepemimpinan populistis sebagai kepemimpinan yang dapat membangunkan solidaritas rakyat, yang menekankan masalah kesatuan nasional, nasionalisme, dan sikap yang berhati-hati terhadap kolonialisme dan penindasan, penghisapan dan penguasaan oleh kekuatan-kekuatan asing (luar negeri). Kepemimpinan populistis ini berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang tradisional. Juga kurang mempercayai dukungan kekuatan serta bantuan hutang-hutang luar negeri (asing). Kepemimpinan jenis ini mengutamakan penghidupan (kembali) nasionalisme. Dan oleh Professor S.N Eisenstadt populistis erat dikaitkan dengan modernitas tradisional.

7. Gaya Administratif atau Eksekutif

Kepemimpinan gaya administratif ialah kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif. Sedang para pemimpinnya terdiri dari teknokrat dan administrator yang mampu menggerakkan dinamika modernisasi dan pembangunan. Dengan demikian dapat dibangun sistem administrasi dan birokrasi yang efisien untuk memerintah yaitu

untuk memantapkan integritas bangsa pada khususnya, dan usaha pembangunan pada umumnya. Dengan kepemimpinan administratif ini diharapkan adanya perkembangan teknis yaitu teknologi, industri, manajemen modern dan perkembangan sosial ditengah masyarakat. Adapun indikator kepemimpinan administratis/eksekutif sebagai berikut:

- a. Memiliki keyakinan bahwa orang lain khususnya anggota organisasi dapat bekerja dan menjadi pemimpin sebaik dirinya, sehingga tidak boleh diremehkan dan harus dihormati/dihargai secara layak dan manusiawi.
- b. Pemimpin memiliki komitmen yang tinggi.
- c. Pemimpin cenderung memiliki orientasi pada kualitas pelaksanaan tugas dan hasilnya.
- d. Berdisiplin dalam bekerja, sehingga sangat meyakinkan, disegani dan dihormati oleh anggota organisasi.
- e. Pemimpin terbuka terhadap kritik, saran dan pendapat, yang dimanfaatkannya untuk memperbaiki kekeliruan atau kesalahan dalam melaksanakan kepemimpinannya.
- f. Menekankan pada perkembangan teknis yaitu teknologi, indutris, manajemen modern dan perkembangan sosial ditengah masyarakat.

- g. Anggota organisasi dituntut kepatuhannya dalam melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan pembidangan dan pembagian kerja yang telah ditetapkan.

8. Gaya Demokratis

Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia, dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Terdapat koordinasi pekerjaan pada semua bawahan, dengan penekanan pada rasa tanggung jawab internal (pada diri sendiri) dan kerja sama yang baik. Kekuatan kepemimpinan demokratis ini bukan terletak pada "person atau individu pemimpin" akan tetapi kekuatan justru terletak pada partisipasi aktif dari setiap warga kelompok.

Kepemimpinan demokratis menghargai potensi setiap individu mau mendengarkan nasihat dan sugesti bawahan. Juga bersedia mengakui keahlian para spesialis dengan bidangnya masing-masing mampu memanfaatkan kapasitas setiap anggota seefektif mungkin pada saat-saat dan kondisi yang tepat. Kepemimpinan demokratis juga sering disebut sebagai kepemimpinan group developer. Kepemimpinan demokratis biasanya berlangsung secara mantap, dengan adanya gejalagejala sebagai berikut:

- a. Organisasi dengan segenap bagian-bagiannya berjalan lancar, sekalipun pemimpin tersebut tidak ada dikantor.

- b. Otoritas sepenuhnya didelegasikan ke bawah, dan masing-masing orang menyadari tugas serta kewajibannya sehingga mereka merasa senang, puas, pasti dan aman menyangkut setiap tugas kewajibannya.
- c. Diutamakan tujuan-tujuan kesejahteraan pada umumnya dan kelancaran kerja sama dari setiap warga kelompok. Dengan begitu pemimpin demokratis berfungsi sebagai katalisator untuk mempercepat dinamisme dan kerja sama demi pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang paling cocok dengan jiwa kelompok dan situasinya.

Gatto dalam Salusu (1996:194) mengemukakan 4 gaya kepemimpinan yaitu :

a) Gaya Direktif,

Pemimpin yang direktif pada umumnya membuat keputusan-keputusan penting dan banyak terlibat dalam pelaksanaannya. Semua kegiatan berpusat pada pemimpin dan sedikit sajakelompok orang lain untuk berkreasi dan bertindak yang diizinkan. Pada dasarnya gaya ini adalah gaya otoriter. Indikatornya adalah sebagai berikut:

- Pemimpin memberikan pengarahan dengan petunjuk yang jelas dan tegas.
- Pemimpin memberikan intruksi yang spesifik tentang peranan dan tujuan bagi bawahannya.

- Pemimpin sangat tinggi orientasinya pada tugas bawahan,
- Pemimpin mengawasi dengan ketat pelaksanaan tugas bawahan.

b) Gaya Konsultatif,

Gaya ini dibangun atas gaya direktif. Kurang otoriter dan lebih banyak melakukan interaksi dengan para staf atau anggota dalam organisasi. Fungsi pemimpin dalam hal ini lebih banyak berkonsultasi, memberikan bimbingan, motivasi, memberi nasehat dalam rangka pencapaian tujuan. Indikatornya adalah sebagai berikut:

- Pemimpin memberikan petunjuk dan pengarahan kepada bawahan,
- Pemimpin berkonsultasi dengan bawahan dalam pengambilan keputusan,
- Pemimpin membuat komunikasi dua arah dengan para bawahan,
- Pemimpin tidak pernah memberikan pengendalian kepada bawahannya.

c) Gaya Partisipatif,

Gaya partisipasi bertolak dari gaya konsultatif, yang bisa berkembang ke arah saling percaya antara pimpinan dan bawahan. Pimpinan cenderung memberi kepercayaan pada kemampuan staf untuk menyelesaikan pekerjaan sebagai tanggung jawab mereka. Sementara itu kontak konsultatif

tetap berjalan terus. Dalam gaya ini pemimpin lebih banyak mendengar, menerima, bekerja sama, dan memberi dorongan dalam proses pengambilan keputusan dan perhatian diberikan kepada kelompok. Indikatornya adalah sebagai berikut:

- Pemimpin selalu mengadakan kerjasama,
- Pemimpin bekerjasama dengan bawahan dalam pengambilan keputusan
- Pemimpin memberikan dukungan kepada bawahan dalam pemecahan masalah dan perbuatan.

d) Gaya Delegasi,

Gaya delegasi ini mendorong staf untuk mengambil inisiatif sendiri. Kurang interaksi dan kontrol yang dilakukan pemimpin, sehingga upaya ini hanya bisa berjalan apabila staf memperhatikan tingkat kompetensi dan keyakinan akan mengejar tujuan dan sasaran organisasi. Indikatornya adalah sebagai berikut:

- Control pelaksana dengan memberikan tanggung jawab kepada bawahan,
- Kepercayaan penuh kepada bawahan untuk menyelesaikan tugas tertentu,
- Kepercayaan kepada bawahan agar percaya diri, mandiri dan dapat mengaktualisasikan diri untuk berprestasi,

- Kewenangan kepada bawahan untuk memutuskan bagaimana cara melaksanakan tugas.

Gaya kepemimpinan seseorang sangat bersifat situasional. Hal ini berarti bahwa tidak ada seorang pimpinan yang sangat konsisten menggunakan satu gaya kepemimpinannya pasti terlepas dari situasi yang dihadapinya. Ukuran kemampuan seorang pemimpin adalah apabila didalam batas tindakannya dapat diikuti oleh orang lain dengan sukarela tanpa paksaan dan apabila karyawan sudah berada dalam pengaruh kepemimpinan yang demikian, maka akan sangat mudah membawa karyawan pada sikap kerja yang baik, harmonis dan bertanggung jawab.

Tipe kepemimpinan kepala Desa dibagi menjadi tiga tipe Kepemimpinan, (Zaini Mustakim 2015:11) yakni Kepemimpinan regresif, Kepemimpinan konservatif-involutif dan Kepemimpinan inovatif-progresif. Lebih rinci sebagai Berikut :

1. Kepemimpinan regresif, Dapat dimaknai sebagai kepemimpinan yang berwatak otokratis, secara teori otokrasi berarti pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Salah satu cirinya adalah anti perubahan, terkait dengan perubahan tata kelola baru tentang Desa baik itu Musyarawah Desa, usaha ekonomi bersama Desa dan lain-lain sudah pasti akan ditolak. Desa yang parokhial (hidup bersama berdasarkan garis kekerabatan, agama, etnis atau yang lain) serta Desa-Desa korporatis (tunduk pada

kebijakan dan regulasi negara) biasanya melahirkan kepemimpinan seperti ini.

2. Kepemimpinan konservatif-involutif, merupakan model kepemimpinan ini ditandai dengan hadirnya kepala Desa yang bekerja apa adanya (taken for granted), menikmati kekuasaan dan kekayaan, serta tidak berupaya melakukan inovasi (perubahan) yang mengarah pada demokratisasi dan kesejahteraan rakyat. Kepemimpinan tipe ini pada umumnya hanya melaksanakan arahan dari atas, melaksanakan fungsi kepala Desa secara tekstual sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala Desa.
3. Kepemimpinan inovatif-progresif, kepemimpinan tipe ini ditandai dengan adanya kesadaran baru mengelola kekuasaan untuk kepentingan masyarakat banyak. Model kepemimpinan ini tidak anti terhadap perubahan, membuka seluas-luasnya ruang partisipasi masyarakat, transparan serta akuntabel. Dengan pola kepemimpinan yang demikian kepala Desa tersebut justru akan mendapatkan legitimasi yang lebih besar dari masyarakatnya.

Aspek paling fundamental dalam menjalankan kepemimpinan Desa adalah Legitimasi, hal ini terkait erat dengan keabsahan, kepercayaan dan hak berkuasa. legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan. Kewenangan untuk memimpin, memerintah, serta menjadi wakil atau representasi dari masyarakatnya

2.1.3 Faktor - Faktor yang mempengaruhi Gaya Kepemimpinan

Kepemimpinan Kepemimpinan Keith Davis menyimpulkan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi kepemimpinan yakni :

1. faktor komunikasi, pemimpin harus mempunyai cara berkomunikasi yang baik bukan hanya sesama anggota tapi juga dengan organisasi lain atau masyarakat, karena komunikasi yang baik dapat menjaga hubungan yang baik satu sama lain.
2. faktor wawasan, pemimpin tersebut mengetahui tentang identitas organisasinya, sejarah dan tujuan pembentukan organisasi tersebut, serta memiliki pemikiran dan pemahaman yang baik.
3. faktor pendukung, seberapa banyak teman yang memberikan dukungan untuk menjadi seorang pemimpin. Semakin banyak teman yang memberikan suara dan dukungan untuk menjadi pemimpin yang baik, semakin besar juga peluang untuk memajukan organisasi tersebut. Teman banyak karena komunikasi yang baik.
4. faktor situasi dan kondisi, bila pemimpin memiliki situasi yang baik di tambah dengan kondisi hubungan yang harmonis pula, pasti seorang pemimpin akan dapat menjaga kebersamaan dalam organisasi yang dia pimpin serta dapat mengarahkan anggotanya untuk bekerja sama membangun organisasi tersebut agar menjadi lebih baik

Disamping itu, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan dari seorang kepala daerah, antara lain:

1. Pengetahuan/Knowledge, Pengetahuan adalah merupakan akumulasi hasil proses pendidikan baik yang diperoleh secara formal maupun non formal yang memberikan kontribusi pada seseorang di dalam pemecahan masalah, daya cipta, termasuk dalam melakukan atau menyelesaikan pekerjaan.
2. Kemampuan/Skill, Kemampuan terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Pengetahuan dan keterampilan termasuk faktor pembentuk kemampuan. Dengan demikian apabila seseorang kepala daerah mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang tinggi akan mampu melakukan terobosan yang bersifat kreativitas dan inovatif.
3. Pengalaman Kerja Merupakan keterampilan yang diperoleh melalui kegiatan kerja yang diukur dari lamanya seseorang bekerja pada suatu bidang tertentu
4. Lingkungan Kerja Segala sesuatu yang ada disekitar organisasi yang mampu memberi dampak seorang kepala dalam menjalankan tata kelola pemerintahan.
5. Perilaku/Attitude Attitude merupakan suatu kebiasaan yang terpolakan, jika kebiasaan yang terpolakan tersebut memiliki implikasi positif dalam hubungannya dengan perilaku kerja seseorang maka akan menguntungkan.

6. Behaviors Ketika pemimpin telah mempunyai knowledge, skills, abilities, dan attitude maka secara langsung perilaku yang akan mencerminkan kepribadian seorang pemimpin. Dengan demikian perilaku manusia akan ditentukan oleh keempat faktor tersebut diatas sehingga dapat mendukung kerja yang efektif atau sebaliknya

Mengacu dari pendapat ahli terkait faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan, maka penulis dalam mengkaji kepemimpinan Bupati Mamasa lebih condong terhadap pendapat Restu Andriawan . Faktor – faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan dalam fenomena yang dikaji dapat terbagi atas pengetahuan, kemampuan, pengalaman kerja, lingkungan kerja, perilaku, dan kepribadian.

2.2 Desa dan Pembangunan

2.2.1 Pengertian dan Sejarah Desa

Desa sejak zaman dahulu menurut hukum adalah “*collegial*” dimana desa merupakan daerah otonomi yang paling tua dimana lahir sebelum munculnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelum adanya kerajaan (negara) sehingga desa memiliki otonomi yang penuh dan asli (Syamsu, 2008;34)

Menurut zoetmulder dalam syarifuddin (2010:12) menyebutkan bahwa desa secara epistemology berasal dari kat “*Swadesi*” yang berasal dari Bahasa sangsekerta yang memiliki arti

wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom, begitupun dengan istilah atau penamaan desa yang tidak sama di beberapa wilayah Indonesia.

Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kata “Desa” memiliki arti kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seseorang kepala desa)

Sukandar Wiratmadja (1984:40) mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Pendapat Sukandar Wiratmadja mengenai definisi desa didukung dengan pengertian desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.

Sejalan dengan itu, B.N Marbun (1980:20) mengatakan bahwa desa merupakan suatu daerah hukum yang sejak beberapa turunan mempunyai beberapa turunan-turunan ikatan kekeluargaan atau ikatan social yang hiduo serta tinggal menetap disuatu daerah tertentu dengan adat istiadat yang dijadikan dasar hukum dan mempunyai seorang pemimpin formal yaitu kepala desa.

Nyoman (1982:26) mengemukakan bahwa desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan berdama sebanyak beberapa ribu

orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan berbagai usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam.

Secara historis desa merupakan akal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintah di Indonesia jauh sebelum Negara ini terbentuk, struktur sejenis desa, masyarakat adat dan budaya telah menjadi institusi social yang mempunyai posisi yang sangat penting.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diartikan Sebagai :

“Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatua Republik Indonesia”.

Desa merujuk pada satuan wilayah dibawah kecamatan. Dilihat dari aspek kependudukan, desa memiliki jumlah penduduk yang absolut dan lebih rendah dibandingkan dengan kelurahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. beberapa persyaratan sebuah desa yang tercantum dalam pasal 8 yaitu pertama, memiliki wilayah kerja dengan akses

transportasi antar wilayah, kedua, kondisi sosial budaya yang mampu menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa. Ketiga, memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung serta keempat, batas wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan Bupati dan atau Walikota.

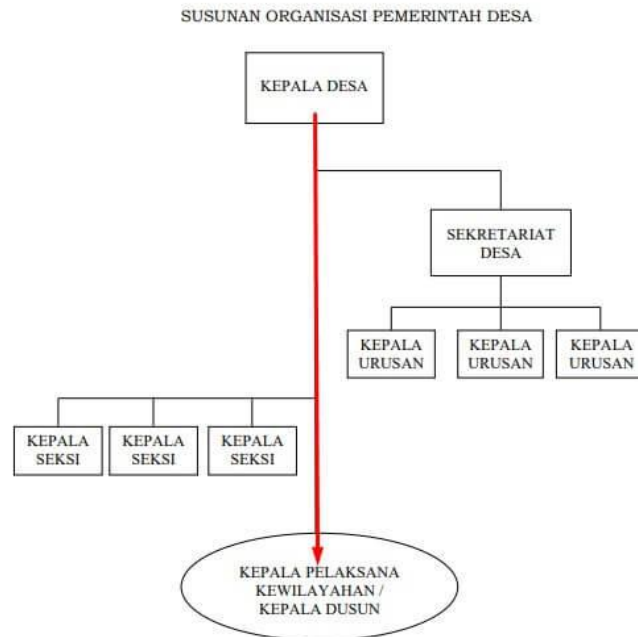
Dalam lingkungan desa terdapat beberapa lembaga yang harus dimiliki desa yaitu sebagai berikut :

1. Perangkat Desa

Ilmar (2013:60), menguraikan bahwa dalam bidang pemerintahan, kemampuan pemerintah, khususnya kemampuan seorang pemimpin yang akan menjalankan dan menyelenggarakan jalannya roda pemerintahan tentunya tidak hanya mempunyai kemampuan dan kompetensi yang sangat baik atau lebih dari cukup untuk mengelola dan mengatur pemerintahan, akan tetapi dibutuhkan sebuah landasan yang kokoh dan kuat berupa paradigma atau sebuah patokan (ukuran) yang nantinya diharapkan mampu membawa kearah dan tujuan pemerintahan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, struktur organisasi pemerintah desa sebagai berikut :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa



(Permendagri No. 84 Tahun 2015)

Setiap perangkat desa yang ada dalam struktur organisasi tersebut memiliki masing-masing tugas pokok dan tanggung jawab dalam membantu pemerintah desa dalam hal ini kepala desa menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai selama satu periode pemerintahan.

2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah representasi perwakilan masyarakat ditingkat desa. Sebagai salah satu bentuk perwujudan demokrasi ditingkat desa. BPD dapat dikatakan

"Parlemen"-nya desa, diaman BPD merupakan lembaga baru di era otonomi daerah.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan desa. Keberadaan BPD dalam pemerintah desa adalah bukti keterlibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintah.

Dengan terbitnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana menempatkan desa sebagai subyek pembangunan, sehingga membuat peran BPD menjadi sangat penting,

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa menguraikan bahwa BPD adalah merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 55 menguraikan fungsi BPD adalah sebagai berikut :

- a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- c) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Melihat ketiga point diatas, dapat disimpulkan bahwa peran BPD sangat besar dalam proses-proses pembangunan di tingkat desa, selain bertindak sebagai lembaga legislasi ditingkat desa, juga berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta fungsi pengawasan,

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa merupakan salah satu organisasi yang dibentuk atas inisiasi dan partisipasi masyarakat dan pemerintah desa

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, diuraikan bahwa lembaga kemasyarakatan desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Padal Pasal 4 ayat (1&2), Permendagri No. 18 tahun 2018 Lembaga Kemasyarakatan Desa Memiliki Tugas dan Fusngsi sebagai Berikut :

1. Tugas LKD

- a) Melakukan pemberdyaan masyarakat desa
- b) Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
- c) Meningkatkan pelayanan masyarakat desa

2. Fungsi LKD

- a) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- b) Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
- c) Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa.
- d) Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e) Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f) Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- g) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

Dengan adanya LPM ditingkat desa, diharapkan mampu menjadi mitra kerja pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ditingkat desa yang bertujuan memberdayakan masyarakat yang ada di desa.

2.3 Pembangunan

pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan (Lewwellen 1995, Larrin 1994, Kiely 1995 dalam Tikson, 2005:85). Paradigma

modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (*under-development*) ketergantungan (*dependent development*) dan sistem dunia (*world system theory*) sesuai dengan klasifikasi Larrain (1994:70). Sedangkan Tikson (2005:85) membaginya kedalam tiga klasifikasi teori pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan. Dari berbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul berbagai versi tentang pengertian pembangunan.

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005:72).

Siagian (1994:122) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai "Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)". Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994:170) memberikan pengertian yang lebih

sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005:23).

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994:20). Portes (1976:70) mendefenisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Deddy T. Tikson (2005:112) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial

dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan, antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dari spiritualisme ke materialisme/sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (*community/group*). Makna penting dari pembangunan adalah

adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, *pembangunan* adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005:112).

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak lagi hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah ke seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, modernisasi diartikan *sebagai proses transformasi dan perubahan dalam masyarakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, budaya, dan sebagainya.*

Oleh karena dalam proses modernisasi itu terjadi suatu proses perubahan yang mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan di mana terjadi proses perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern, yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern, menggantikan alat-alat yang tradisional.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

2.3.2 Dinamika Pembangunan Desa

Sejak Indonesia mengawali kemerdekaannya, pembangunan desa telah menjadi fokus perhatian pemerintah, namun strategi pembangunan desa dari waktu ke waktu sering kali mengalami perubahan. Perubahan strategi dimaksudkan untuk menemukan strategi pembangunan desa yang dipandang paling efektif untuk suatu kurun waktu tertentu. Pada awal kemerdekaan kita kenal "Rencana Kesejahteraan Kasimo" atau Kasimo Welfare Plan. Sebagaimana konotasi awal pembangunan desa sering kali diartikan sebagai identik dengan pembangunan pertanian. Kasimo Welfare Plan yang dicanangkan pada tahun 1952 memang berorientasi pada peningkatan produksi pangan.

Di dalam suatu situasi dimana devisa amat langka, terpenuhinya kebutuhan pangan berarti penghematan devisa. Strategi yang digunakan dipengaruhi oleh apa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, yang di kenal dengan strategi *olie vlek* atau percikan minyak.

Pada lokasi-lokasi yang dipandang kritis diadakan semacam demonstration plot yang memberikan contoh teknik bertani yang baik dengan harapan teknik ini akan menyebar ke daerah sekitarnya. Karena kekurangan, baik dana maupun keahlian, Rencana Kasimo ini tidak mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan (Tjokrowinoto, 1996: 35).

Di sekitar tahun 1959 perhatian pemerintah terhadap pembangunan desa ini makin meningkat sebagaimana terbukti dengan didirikannya departemen yang membidangi pembangunan desa, yaitu Departemen Transkopemada (Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Desa). Fungsi Biro Pembangunan Desa yang tadinya berada di Kantor Perdana Menteri kemudian dialihkan ke Departemen Transkopemada. Strategi yang digunakan banyak diilhami oleh konsep community development. Titik berat pembangunan desa adalah pada pembangunan masyarakatnya. Titik tekannya adalah pada pembentukan kader-kader pembangunan masyarakat desa yang diharapkan akan menopang tercapainya masyarakat desa yang berswasembada. Pembangunan desa pada waktu itu dilaksanakan berdasar Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960, yang dirumuskan oleh Biro Perancang Negara. Titik berat pembangunan desa adalah pada pembangunan masyarakatnya. Oleh karena itu istilah yang digunakan adalah Pembangunan Masyarakat Desa (PMD). Garis-Garis Besar Rencana Pembangunan Lima Tahun

itu menyebutkan bahwa tujuan PMD adalah (Ndraha,1986: 3):
“meninggalkan taraf penghidupan masyarakat desa dengan jalan melaksanakan pembangunan yang integral dari pada masyarakat desa, berdasarkan asas kekuatan sendiri dari pada masyarakat desa serta asas permufakatan bersama antara anggota- anggota masyarakat desa dengan bimbingan serta bantuan alat-alat pemerintah yang bertindak sebagai suatu keseluruhan (kebulatan) dalam rangka kebijaksanaan umum yang sama.”

Dengan demikian, pembangunan masyarakat desa dilakukan berdasarkan 3 azas, yaitu azas pembangunan integral, azas kekuatan sendiri, dan azas permufakatan bersama: (Tjokrowinoto, 2007: 36). Adapun ke 3(tiga) azas tersebut adalah:

Pertama. azas pembangunan integral ialah pembangunan yang seimbang dari semua segi-segi masyarakat desa (pertanian, pendidikan, kesehatan, perumahan dan sebagainya), sehingga menjamin suatu perkembangan yang selaras dan yang tidak berat sebelah. Tetapi perlu diingat bahwa untuk masa permulaan titik berat terutama harus diletakkan dalam pembangunan ekonomi.

Kedua. azas kekuatan sendiri ialah bahwa tiap-tiap usaha pertama-tama harus didasarkan pada kekuatan atau kemampuan desa sendiri, dengan tidak menunggu-nunggu pemberian dari pemerintah.

Ketiga. azas permufakatan bersama diartikan bahwa usaha pembangunan harus dilaksanakan dalam lapangan-lapangan yang benar-benar dirasakan sebagai kebutuhan oleh anggota-anggota masyarakat desa yang bersangkutan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu, membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian

Pada bagian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisilinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini di antara lain :

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu

1	
Peneliti	Heru Subando. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Judul	Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Membentuk Motivasi Kerja Guru
Teori dan Konsep	Kepemimpinan dan Motivasi
Hasil Penelitian	Aktifitas Kepemimpinan Kepala Sekolah ada kaitannya dengan perkembangan sekolah sebagai suatu organisasi. Sekolah dengan tingkat perkembangan organisasi yang masih dalam kategori sederhana aktivitas kepemimpinan yang dominan dilaksanakan adalah: Memperkokokh keorganisasian, Membangun Komunikasi, Penguatan Pilar manajemen program penjaminan, membangun kemitraan dan mengembangkan wirausaha. Dengan konsep efesiensi pembiayaan, tetapi efektif dalam mencapai tujuan pendidikan.
2	
Peneliti	Muhammad taufiq F B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Gadjah Mada
Judul	

	Analisis Kepemimpinan Inovatif Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa
Teori dan Konsep	Kepemimpinan Inovatif, Kepala Desa, Efektif, Inovasi.
Hasil Penelitian	Keberhasilan Kepala Desa Sehingga mampu mengaplikasikan inovasi-inovasinya dalam penyelenggaraan pembangunan desa dipengaruhi oleh kriteria pemimpin efektif dan inovatif yang dimiliki olehnya. Berdasarkan sepuluh indikator kriteria pemimpin efektif dan inovatif dapat disimpulkan menjadi tiga perilaku yaitu: pertama, perilaku berorientasi pada tugas, kedua berorientasi pada hubungan dan ketiga berorientasi pada perubahan.
3	
Peneliti	Andi Ridha Rimbawan Abidin, Program Pasca Sarjana, Universitas Hasanuddin
Judul	Analisis kepemimpinan Bupati Mamasa Periode 2013-2018
Teori dan Konsep	

	Gaya Kepemimpinan, Faktor-Faktor Memengaruhi, Dampak Gaya kepemimpinan
Hasil Penelitian	Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Bupati Mamasa beragam, disesuaikan situasi dan kondisi. Gaya kepemimpinan yang diterapkan adalah gaya demokratis, administrative dan otokratis. Kepemimpinan Bupati Mamasa dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, kemampuan, pengalaman Kerja dan kepribadian. Gaya kepemimpinan Bupati Mamasa memiliki dampak dari segi ekonomi terjadi peningkatan pendapatan, segi sosial terciptanya kerukunan antar umat, segi pemerintahan terwujudnya rencana pembangunan, dan segi politik pada pemilihan berikut tidak mendapay lawan berart dengan hanya melawan bamngku kosong.

Berikut tiga penelitian terdahulu yang relevan untuk dijadikan sebagai perbandingan dan rujukan untuk melakukan penelitian terkait Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembanguna di Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu.

2.4 Kerangka Pikir

Kepemimpinan dipandang sebagai salah satu fungsi manajemen. Sebagai salah satu fungsi manajemen, kepemimpinan menyangkut beberapa tugas atau kewajiban. Dan dalam kepemimpinan pemerintahan, kewajiban bagi pemimpin pemerintahan adalah mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kekuasaan atau dalam rangka memecahkan berbagai persoalan dalam organisasinya. Pemimpin diharapkan mampu menjadi panutan bagi bawahan dalam menjalankan fungsinya sebagai leader.

Dalam konsep kepemimpinan didesa, seorang pemimpin diharapkan mampu menggerakkan bawahannya yakni organisasi perangkat desa sehingga dapat mewujudkan visi dari pemimpin yang telah direncanakan dan disusun dengan suasana moralitas yang tinggi, sehingga dengan penuh semangat dan kegairahan dapat menyelesaikan pekerjaan masing-masing dengan hasil yang diharapkan. Mengacu pada konsep kepemimpinan tersebut.

Pada dasarnya kepemimpinan seorang Kepala Desa sangat tergantung pada gaya yang dimilikinya, karena berangkat pada masyarakat yang memiliki berbagai macam cara berfikir, berbagai macam keinginan, dan berbagai macam hal yang diinginkan, sehingga menjadi karakter suatu masyarakat. Seorang pemimpin harus mampu

memiliki gaya yang memungkinkan mengakomodasi apa yang menjadi keinginan masyarakat tersebut, sehingga terjadi hubungan yang baik antara seorang pemimpin dengan masyarakatnya.

Gaya kepemimpinan tidak lahir begitu saja akan tetapi dipengaruhi berbagai macam faktor, baik yang sifatnya genetik dalam diri seorang pemimpin, maupun faktor lingkungan dimana mereka berada dan tingkat pendidikan yang dimilikinya serta pengalaman. Faktor – faktor yang mempengaruhi inilah yang membuat seorang pemimpin menciptakan berbagai macam prestasi yang nantinya akan memberikan dampak kepada masyarakat.

Dampak dari penerapan gaya kepemimpinan yang baik yakni pertama, mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat, dalam hal menjangkau aspirasi masyarakat. Kedua, terjadi hubungan baik antara pemimpin dan masyarakat. Ketiga, pemimpin dapat diterima oleh masyarakat, tidak ada sekat dalam penyampaian aspirasi masyarakat. Disamping itu, yang terpenting adalah bagaimana kemampuan seorang pemimpin didalam memberikan dampak yang positif kepada masyarakatnya.

Kerangka pikir digunakan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi terhadap karya ilmiah yang dikaji . Di bawah ini peneliti akan memberikan gambaran tentang kerangka pemikiran dari karya ilmiah serta pola pikir peneliti dalam menghadapi fenomena yang ada:



Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir